



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH (BPKPAD)**

Jalan Pemuda Nomor 294 Kode Pos 57424
Telp. (0272) – 321046 Facsimile 322567, Telex 325367 K L A T E N

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

BAB II. RENCANA KINERJA 5

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan 5

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 7

3. Indikator dan Target Kinerja Yang Akan Dicapai Serta Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 7

BAB III. PENUTUP 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. BPKPAD Kabupaten Klaten menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan

Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. BPKPAD terletak di Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten atau lebih dikenal sebagai kompleks Pemda Klaten yang beralamatkan di Jalan Pemuda 294 Klaten.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang keuangan. BPKPAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKPAD menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang keuangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis sebagai identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah yang masih rendah dengan ketergantungan terhadap dana dari pusat yang tinggi.
2. Kualitas Laporan Keuangan Daerah belum mencerminkan keadaan sesungguhnya. Pencatatan aset daerah belum mencerminkan kondisi

yang sebenarnya, demikian pula untuk belanja daerah masih banyak pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan.

3. Masih adanya kesalahan dalam penganggaran, sebagai akibat kesalahan perencanaan dan kurang akuratnya perhitungan kebutuhan anggaran yang diperlukan.
4. Masih lemahnya pencatatan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
5. Capaian realisasi anggaran (belanja daerah) belum optimal.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 BPKPAD Kabupaten Klaten disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada BPKPAD Kabupaten Klaten.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 adalah :

- 1 Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024; dan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja BPKPAD Kabupaten Klaten.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BPKPAD KABUPATEN KLATEN

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKPAD Kabupaten Klaten diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahunan Tahun 2022 serta pencapaian terhadap target akhir pada BPKPAD Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

Sasaran / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome)	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2024	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2024	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2024	Th 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Persentase OPD menyusun Rencana Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	86 %	84 %	84,5 %	85 %	85,5 %	86 %	84 %	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	12%	10%	10,5%	11%	11,5%	12%	10%	-	-	-	-	100	-	-	-	-

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Tujuan merupakan hasil akhir (*results*) yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan juga merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan kemana tujuan (*destination*) yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten adalah **meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.**

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai BPKPAD Kabupaten Klaten adalah **meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.** Tabel Rencana Kinerja BPKPAD Tahun 2024 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN BPKPAD KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2023.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPAD Kabupaten Klaten beserta indikatornya sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BPKPAD TAHUN 2024

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Satuan
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	602,495,713,000	100	%
		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)		100	%
		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah		84.5	%
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu sesuai Surat Edaran Bupati	2.164.970.000	100	%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang tersusun	110.673.000	2	Dokumen
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS yg tersusun	110.673.000	2	Dokumen
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	36.891.000	52	Dokumen
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	52.701.000	52	Dokumen
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	10.540.000	52	Dokumen
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	15.810.000	52	Dokumen

5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun	801.060.000	2	Dokumen
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	973.921.000	2	Dokumen
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang dilatih penganggaran APBD	52.701.000	120	Orang
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	759.402.000	84.5	%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Frekuensi Pengelolaan Kasda	76.944.000	12	Kali
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Bendel SPD	20.027.000	900	Bandel
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Frekuensi Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	125.429.000	12	Kegiatan
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D, SPB, SP2B yang diterbitkan	101.187.000	12.000	lembar
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Frekuensi Pengelolaan piutang dan utang daerah	43.215.000	12	Kegiatan

5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang diterbitkan	172.860.000	3,500	lembar
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Perda/Perbup Yg Tersusun	37.945.000	2	Perda/Perbub
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembinaan	181.795.000	2	Kali
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	1.393.399.000	100	%
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sisdur Keuangan Daerah dikelola	128.567.000	1	Sisdur
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/KotaPenjabaran	Jumlah jenis Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang disusun	210.805.000	2	Dokumen
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Jenis Data yang dikelola	105.403.000	1	Jenis Dokumen
502.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran tersusun	790.520.000	1	Jenis Dokumen
5.0202.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	158.104.000	2	Dokumen
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankeusus)	620.417.675.000	99	%

5.02.02.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Frekuensi Sosialisasi dan penyerahan pagu bantuan keuangan	599.600.637.814	2	Kegiatan
5.02.02.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	5.270.132.000	42	%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase pencairan belanja bagi hasil	15.546.905.186	85	%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prsésentasi barang milik daerah yang teregristrasi	2.976.843.000	100	%
5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian registrasi Barang Milik Daerah	2.976.843.000	100	%
5.02.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Jenis Dokumen Standarisasi yang tersusun	289.858.000	3	Jenis Dokumen
5.02.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersusun	158.104.000	2	Jenis Dokumen
5.02.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik daerah Kabupaten Klaten	Jumlah bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang teramankan	527.014.000	310	Buah
5.02.03.2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	frekuensi pengawasan/pengendalian barang	52.701.000	5	UPB
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelolaan Barang (UPB) terkelola	837.122.000	930	UPB
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB)Yg Direkonsiliasi	158.104.000	930	UPB
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus barang yang terbina	953.940.000	930	Orang

5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	2.878.400.000	10.5	%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	2.878.400.000	10.5	%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi penyuluhan pajak daerah	498.028.000	30	Kali
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang terpelihara	709.571.000	3	Sistem
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Frekuensi Pendataan	124.902.000	15	Kegiatan
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Frekuensi kegiatan update data Wajib Pajak daerah	436.058.000	12	Kegiatan
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan Konsultasi	316.962.000	20	Kali
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah, intensifikasi pajak daerah dan pemberian hadiah pajak daerah	763.876.000	30	kali
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemeriksaan Pajak Daerah dan Frekuensi Penertiban Reklame	17.181.000	12	Kegiatan
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Frekuensi Monitoring Retribusi Daerah	11.822.000	12	Kegiatan
			608,142,516,000		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	21.629.023.000	100	%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	32.480.000	71	%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	16.240.000	3	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	16.240.000	1	Dokumen

5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	18.607.183.000	100	%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	18.486.012.000	97	Orang
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor PA SKPD dan PPTK	121.171.000	2	orang
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	317.262.000	100	%
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	317.262.000	73	Unit
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	439.424.000	100	%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15.810.000	7	Unit
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	52.701.000	48	Unit
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	11.490.000	16	Unit
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	52.701.000	11	Eksemplar
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	10.540.000	8	eksemplar
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	105.403.000	100	Kali
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.158.000	100	Kali
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	31.621.000	1,000	dokumen
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	593.531.000	100	%
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	478.531.000	1	Unit

5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di adakan	15.000.000	1	Unit
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	100.000.000	2	Unit
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	284.877.000	100	%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	4.216.000	300	eksempla
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	200.265.000	12	Bulan
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	80.396.000	5	Orang
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1.354.266.000	100	%
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	1.238.218.000	95	Unit
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	7.220.000	50	Unit
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	52.701.000	2	Unit
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	56.127.000	60	Unit
Total Anggaran			652.219.712.000		

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 perlu diselenggarakan sebagai komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKPAD Kabupaten Klaten disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Perencanaan kinerja tahunan menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

Klaten, 3 Januari 2023

Kepala BPKPAD Kab. Klaten



MUH. HIMAWAN P., SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19761005 199602 1 004